

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2009, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung
- Adjie, Habib dan Sjaifurrachman, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung.
- Adjie, Habib, 2011, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2011, Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, PT Refika Aditam, Bandung.
- _____, 2013, Menjalिन Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan, PT Citra Aditya Bakti, Surabaya.
- Adjie, Habib, 2013, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT Refika Aditama, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta.
- Budiono, Herlien, 2013, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, PT Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Koentjoro, Diana Halim, 2004, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Makmur, 2011, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, PT Refika Aditama, Bandung.
- Nico, 2003, Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, CDSBL, Yogyakarta.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prajogo, Soesilo, 2007, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, WIPRESS.
- R. Soesanto, 1982, Tugas Kewajiban dan Hak-Hak Notaris Wakil Notaris, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Satriawan, Iwan, dkk, 2007, Pedoman Penelitian dan Penulisan Hukum, Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1980, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta.
- _____, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, UI-PRESS, Jakarta
- Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, CV ALFABETA, Bandung.
- Sujamto, 1987, Aspek-Aspek pengawasan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2005, Statistika Untuk Penelitian, CV ALFABETA, Bandung.
- Suwarno, 1999, Perilaku Keorganisasian, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Tedjosaputro, Liliana, 1995, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.
- Tobing, Lumban, 1999, Peraturan Jabatan Notaris Notaris Reglement, Erlangga, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Tentang Jabatan Notaris, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Reublik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Sususnan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Notaris.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Oleh Majelis Pengawas Notaris.

C. Internet

Jusuf Pratianto Tjahjono, Notaris dan PPAT di kota surabaya, “Kedudukan Majelis Pengawas Notaris Dalam Sistem Hukum Indonesia,” <http://notarissby.in/2008/04/majelis-pengawas-notaris.html?m=1>, diakses tanggal 10 Januari 2015.

Isyana W. Sadjarwo S.H.,M.H. Majelis Pengawas Pusat Notaris, “ Prosedur dan Proses Beracara Penjatuhan Sanksi Displinar terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris serta Upaya Hukum Notaris Selaku Terlapor”, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/384/notarisopenbareamtbenarensyafran-sofyan>. Diakses pada tanggal 2 juni 2015.

Kanwil Kemenkumham DIY, “ Majelis Pengawas Notaris Gelar Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan di DIY”, <http://kumham-jogja.info/arsip-berita/1177-majelis-pengawas-pusat-notaris-gelar-kegiatan-pembinaan-dan-pengawasan-di-diy>, diakses pada tanggal 15 juni 2015.